

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan pembangunan seringkali tidak terbagi secara merata di seluruh negeri, dan Ketidakseimbangan wilayah sering kali menimbulkan masalah besar. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Selama proses pembangunan, terkadang muncul berbagai masalah seperti ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Pembangunan yang terjadi pada suatu wilayah dapat dikatakan berhasil jika tantangan tersebut berkurang atau menurun. Isu strategis yang menjadi perhatian utama RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 adalah ketimpangan yang terjadi antar provinsi dalam suatu wilayah pulau.

Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi di berbagai wilayah. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sumber daya alam yang tersedia serta kondisi geografis di masing-masing daerah. Perbedaan ini berimplikasi pada kemampuan setiap daerah dalam mendorong proses pembangunan (Safitri, 2021). Dengan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu negara maupun daerah, terdapat variasi dalam kinerja perekonomian dan tingkat kemakmuran antar negara atau daerah yang satu dengan yang lainnya (Razak, 2009).

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah dapat lebih baik melalui penekanan pada kebijakan yang mengedepankan masing-masing daerah. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelembagaan, dan sumber daya fisik yang tersedia, diharapkan dapat



mendorong inisiatif dari daerah itu sendiri dalam proses pembangunan (Fattah, 2013). Pengembangan potensi lokal dilakukan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa fokus pembangunan tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Dalam Zusanti (2020), Dampak positif dari ketimpangan adalah dapat memotivasi wilayah lain yang kurang maju untuk berupaya bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya, sehingga pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan. Namun, terdapat pula dampak negatif dari ketimpangan, seperti potensi inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas, serta tingginya ketimpangan yang sering kali dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Dampak negatif dari ketimpangan ini dapat menjadi tantangan dalam upaya pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan antar wilayah (*regional disparity*) muncul sebagai akibat dari ketidakmerataan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.

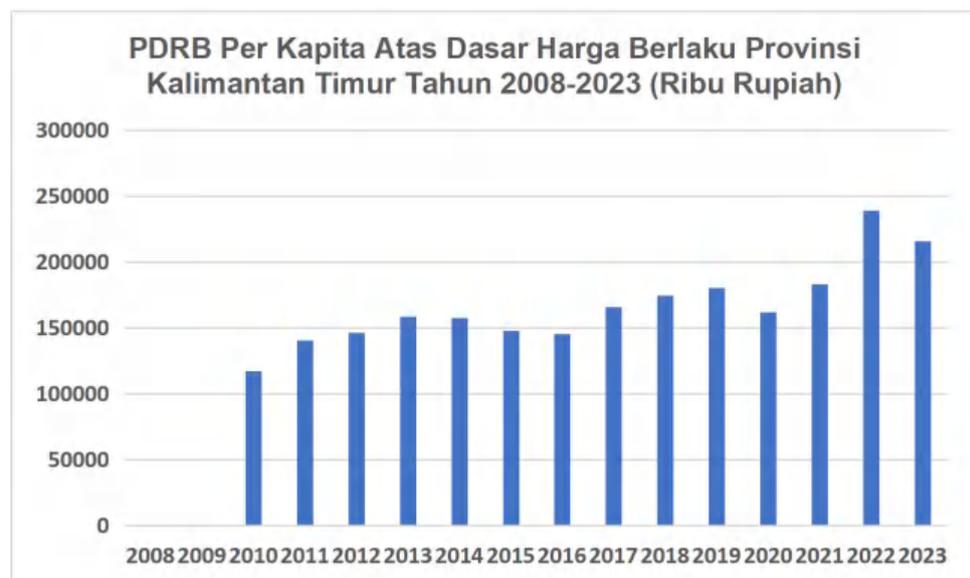
Pemerintah daerah memiliki kebijakan untuk merumuskan strategi ekonomi yang sejalan dengan karakteristik dan potensi daerah tersebut. Hal ini dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip dan tujuan yang ditetapkan oleh negara. Dengan adanya kebijakan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik suatu daerah, diharapkan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah berkembang dengan lebih baik (Harris, 2019). Melalui pembangunan yang baik pada suatu daerah, hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Menurut Ratu (2019), pembangunan ekonomi



dipahami sebagai serangkaian proses yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan aktifitas ekonomi, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 7 kabupaten dan 3 kota, dengan karakteristik sumber daya alam yang hampir sama, khususnya dalam sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian, walaupun memiliki kesamaan dalam jenis sumber daya, namun perolehan pendapatan ekonomi yang dihasilkan setiap daerah berbeda-beda (Bappeda, 2019).

Berikut ini disajikan gambar 1.1 yang dalam hal ini menunjukkan laporan PDRB perkapita untuk Provinsi Kalimantan Timur, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika pada tahun 2008-2023.



Sumber: Badan Pusat Statistika, 2023 (data diolah)

ambar 1.1 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2023



Jika dilihat dari PDRB perkapita di Provinsi Kalimantan Timur, terlihat adanya pertumbuhan PDRB per kapita yang cukup signifikan dari tahun 2008-2023. Hal ini menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur. Terutama pada tahun 2022, terjadi lonjakan yang signifikan, mengindikasikan adanya faktor-faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi kinerja ekonomi Kalimantan Timur pada tahun tersebut. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap lonjakan ini adalah peningkatan harga komoditas global, terutama batu bara, yang memiliki peran penting dalam PDRB Kalimantan Timur.

Dari data tersebut, meskipun PDRB per kapita Kalimantan Timur tergolong tinggi, hal ini tidak serta merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan wilayah di Kalimantan Timur terlihat dari perbedaan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar, serta dari pola pembangunan ekonomi yang bervariasi. Wilayah perkotaan, yang sering menjadi pusat pemerintahan dan industri, mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, sehingga menarik investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Sisi lain, wilayah pedalaman dan daerah tertinggal masih menghadapi tantangan dalam pembangunan. Situasi ini dapat menciptakan tantangan tersendiri, dimana keterbatasan infrastruktur dan investasi berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan wilayah.

Peran pemerintah daerah dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah sangat diperlukan. Menurut Dhyatmika (2013), pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama peningkatan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah,



diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga hal ini dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah nomor 12 tahun 2019 dijelaskan bahwa belanja daerah merujuk pada semua kewajiban yang diakui oleh pemerintah daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Saat pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk sarana dan prasarana atau infrastruktur publik, hal ini dapat memfasilitasi pergerakan sektor-sektor perekonomian, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik (Fattah *et al*, 2022). Belanja pemerintah daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah, sehingga dapat membantu dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Selain pengeluaran pemerintah, penduduk memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan upaya dalam pembangunan perekonomian. Jumlah penduduk disuatu daerah juga mencerminkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah masing-masing (Zasriati, 2022). Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah dipandang sebagai modal dasar pembangunan, namun juga dapat dilihat sebagai tantangan bagi pembangunan itu sendiri. Penduduk dikatakan sebagai modal dasar jika, dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas, keterampilan, dan keahlian yang pada gilirannya akan mendorong produksi nasional. Namun

ya, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi beban ketika struktur daerah yang tidak memadai, serta produktivitas yang rendah (Devita,



Jumlah penduduk dapat menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan apabila sebaran populasi tidak merata. Ketidakeimbangan dalam jumlah penduduk di wilayah tertentu bisa berdampak pada kondisi perekonomian di daerah tersebut (Nurlaili, 2015). Konsentrasi penduduk di kota-kota besar dapat mengakibatkan urbanisasi yang sulit dikendalikan, sementara daerah pedesaan mengalami penurunan jumlah penduduk. Situasi ini berpotensi menimbulkan berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah pedesaan.

Selain pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk, investasi juga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi pada suatu daerah, baik itu investasi PMA maupun investasi PMDN. Dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah, keberadaan modal dalam hal ini investasi dapat diartikan sebagai sumber dana pembangunan daerah (Azim, 2022). Menurut teori Myrdal, terdapat kecenderungan bahwa investasi dapat berkontribusi pada peningkatan ketidakmerataan. Kondisi ini menjadikan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, infrastruktur yang baik, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi menarik bagi investor, sementara daerah yang lain tertinggal. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty (2014) yang mengindikasikan adanya hubungan positif antar investasi dan ketimpangan spasial.

Investasi baik PMA maupun PMDN memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, karena berhubungan erat dengan keberlanjutan kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Proses produksi barang dan

; meningkat akan berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. demikian, tenaga kerja dapat memperoleh upah yang berujung pada tan daya beli masyarakat. Selain itu, semakin banyak investasi yang



dialokasikan untuk proses produksi barang dan jasa, semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap, yang pada akhirnya dapat mendukung pemerataan pendapatan per kapita pada suatu wilayah. Oleh karena itu, penanaman modal melalui investasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya ketidakseimbangan dalam pembangunan antar daerah yang lebih maju dan yang masih tertinggal, berbagai dampak negatif dapat muncul seperti, konflik sosial dan peningkatan angka kemiskinan. Kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan sering kali mengalami ketidakpuasan, yang berujung pada protes atau kerusuhan. Selain itu, ketidakadilan sosial dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik masyarakat, menciptakan siklus negatif yang sulit diatasi dan memerlukan intervensi yang efektif untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi disparitas pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Disparitas Pembangunan Wilayah Antar Di Provinsi Kalimantan Timur**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh belanja modal pemerintah terhadap ketimpangan



ah di Provinsi Kalimantan Timur?

berapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan wilayah di

ansi Kalimantan Timur?

3. Seberapa besar pengaruh investasi PMA terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur?
4. Seberapa besar pengaruh investasi PMDN terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi PMA terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
4. Untuk mengetahui pengaruh investasi PMDN terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan yang mendalam mengenai disparitas pembangunan antar wilayah. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai daerah-daerah yang lebih maju serta yang tertinggal. Hasil penelitian ini membantu pemerintah untuk menetapkan prioritas pembangunan serta dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang mengalami ketertinggalan akibat

ritas pembangunan



2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berkontribusi menyebabkan ketimpangan wilayah, serta dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal di Kalimantan Timur. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan landasan teoritis yang lebih kuat untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan disparitas pembangunan wilayah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan yang juga sering disebut sebagai disparitas, merupakan konsekuensi dari upaya pembangunan yang belum sepenuhnya merata. Ketimpangan merupakan fenomena yang sering ditemui diberbagai lapisan negara didunia, baik negara miskin, negara sedang berkembang bahkan negara maju sekalipun. Perbedaan yang ada terletak pada besaran tingkat ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, ketimpangan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, yang ada hanyalah bagaimana cara untuk menekan tingkat ketimpangan tersebut hingga dapat mencapai batas yang dapat ditoleransi. Menurut pandangan Neo-klasik, ketimpangan pembangunan wilayah dapat dipahami melalui perbedaan yang ada dalam hal sumber daya, tenaga kerja, dan modal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Menurut Mubyarto (1995) dalam Islami dan Nugroho (2018) mengkalsifikasi ketimpangan menjadi 3, yaitu:

1. Ketimpangan antar sektor, yang mencakup sektor industri dan pertanian
2. Ketimpangan antar wilayah, ketimpangan ini dapat muncul akibat perbedaan sumber daya yang ada
3. Ketimpangan antar kelompok ekonomi, ketidaksetaraan jenis ini merupakan hal yang paling serius. Ketimpangan ini sangat mungkin muncul dalam sistem ekonomi yang cenderung bebas atau kapitalis



analisis yang dilakukan oleh Douglas C. North mengenai hipotesis Neo-
memberikan landasan teoritis yang penting dalam memahami fenomena

ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Faktor-faktor yang umumnya memengaruhi ketimpangan antar wilayah sering kali berkaitan dengan sumber daya alam, seperti keberadaan mineral, minyak dan gas yang bervariasi antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Perbedaan ini yang dapat menghasilkan efisiensi dalam kegiatan produksi di wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik dengan biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, tingkat perkembangan ekonomi di wilayah yang kondisinya baik cenderung lebih cepat meningkat dibanding dengan wilayah yang lain.

Namun, apabila pembangunan terus berlanjut, biasanya akan terjadi penurunan ketimpangan antarwilayah secara bertahap. Fenomena ini disebabkan oleh fakta bahwa, pada saat proses pembangunan baru dimulai, kesempatan yang tersedia seringkali lebih banyak dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang sudah memiliki kondisi pembangunan yang lebih baik. Dalam konteks ini, ketimpangan pembangunan diilustrasikan sebagai kurva berbentuk huruf U terbalik. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi yang semakin signifikan, wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang berkembang mulai mendapatkan perhatian lebih dalam hal pembangunan infrastruktur dan akses terhadap sumber daya. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan memberikan kesempatan bagi daerah-daerah tersebut untuk mengejar ketertinggalan. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan yang lebih baik dalam distribusi pembangunan antar wilayah.

Ketimpangan wilayah dapat dianalisis menggunakan berbagai alat ukur yang bertujuan untuk menilai sejauh mana ketimpangan yang terjadi di



wilayah tersebut. Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah itu sendiri adalah Indeks Williamson.

Indeks williamson digunakan dalam analisis kesenjangan regional, baik dalam tingkat kabupaten, kota, maupun antar provinsi. Dengan menggunakan alat analisis ini peneliti dapat memperoleh pemahaman terkait peran ketimpangan ekonomi dalam pengembangan wilayah suatu daerah. Indeks ini mengutamakan analisis perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB0 per kapita dengan total jumlah penduduk pada suatu wilayah. Indeks williamson umumnya dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu;

$IW < 0,35$: ketimpangan rendah

$0,35 < Iw < 0,50$: ketimpangan menengah

$Iw > 0,50$: ketimpangan tinggi

2.1.2 Pengeluaran Belanja Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, dengan melaksanakan fungsi regulasi, penyediaan barang publik, dan stabilisasi ekonomi. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab dalam memastikan keadilan sosial dalam masyarakat. Keynes mengemukakan pandangan tentang pentingnya intervensi pemerintah dalam bidang fiskal untuk mencapai keseimbangan dalam ekonomi pasar, tanpa tujuan untuk mengendalikannya secara keseluruhan. Salah satu peran yang dijelaskan oleh Keynes adalah pengeluaran pemerintah, yang berfungsi sebagai pengatur dalam aktivitas



(Ariansyah, 2018).

Sistem anggaran yang diatur berdasarkan Permendaagri No. 13 Tahun 2006 membagi belanja menjadi dua kategori, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merujuk pada pengeluaran yang dianggarkan khusus untuk mendukung pelaksanaan program-program tertentu. Adapun belanja langsung terdiri dari, kegiatan pembuatan jalan, pengadaan kendaraan dinas operasional, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, termasuk juga didalamnya belanja modal yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang telah direncanakan. Disisi lain, belanja tidak langsung adalah pengeluaran yang dianggarkan tetapi tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan program-program tersebut. Kategori dalam belanja tidak langsung mencakup, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga (Alfurqani, 2021).

Fatihudin (2019) belanja modal termasuk dalam lima kategori utama: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan fisik lainnya.

1. Belanja modal tanah

Dalam hal ini adalah biaya yang dilakukan untuk mendapatkan, membeli, atau pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan, pembuatan sertifikat dan biaya lainnya yang terkait dengan memperoleh tanah dan memastikaan bahwa tanah tersebut siap digunakan. Biaya-biaya ini mencakup tidak hanya harga pembelian atau isan lahan itu sendiri, tetapi juga meliputi rangkaian proses administratif yang diperlukan secara esensial.



2. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merujuk pada pengeluaran atau biaya yang dialokasikan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, serta peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, termasuk juga inventaris kantor. Pengeluaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan memastikan bahwa peralatan serta mesin tersebut berada dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merujuk pada pengeluaran atau biaya yang dialokasikan untuk pengadaan, penambahan, maupun penggantian gedung dan bangunan. Hal ini juga mencakup pengeluaran yang berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas hingga gedung dan bangunan tersebut siap digunakan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian. Hal ini mencakup peningkatan pembangunan atau pembuatan, serta perawatan yang diperlukan. Selain itu, pengeluaran ini juga mencakup biaya untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jalan, irigasi, dan jaringan sehingga dapat berfungsi dengan baik dan siap digunakan.



a modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya merujuk kepada pengeluaran atau biaya yang dialokasikan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, serta perawatan terhadap berbagai aset fisik yang tidak termasuk dalam kategori belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Selain itu, kategori ini juga mencakup belanja modal untuk kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, serta barang untuk museum, hewan ternak, tanaman, buku, dan jurnal ilmiah.

2.1.3 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk diartikan sebagai semua individu yang tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, serta mereka yang tinggal kurang dari enam bulan dengan niat untuk menetap (BPS, 2013). Dalam pertambahan penduduk, terdapat tiga faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan di suatu wilayah, yaitu: 1). Fertilitas, yang merujuk pada jumlah bayi yang dilahirkan; 2). Mortalitas, yang mengacu pada keadaan dimana seseorang tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan; dan 3). Migrasi, yang merupakan proses perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya (Damanik, 2020).

David Ricardo mengemukakan pandangannya bahwa saat pertumbuhan penduduk meningkat secara signifikan, hal ini dapat berakibat pada kelebihan tenaga kerja, kelebihan tenaga kerja tersebut dapat menyebabkan penurunan upah yang diterima. Dalam kondisi ini, perekonomian berpotensi mengalami



yang dikenal sebagai *Stationary State*. Situasi ini dapat menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Todaro dan Smith (2006) dalam Nursetianugrum (2018) menjelaskan bahwa terdapat tujuh konsekuensi negatif yang mungkin muncul akibat pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional. Seiring dengan pertumbuhan populasi, terjadi peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur, yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi serta memperburuk kondisi kemiskinan. Selain itu, dengan bertambahnya jumlah individu yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, ketimpangan pendapatan juga cenderung meningkat, sehingga menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara kelompok yang mampu secara ekonomi dan yang kurang dalam ekonomi.

2.1.4 Investasi PMA

Investasi adalah proses penanaman modal yang dilakukan dengan harapan untuk memperoleh imbal hasil dimasa yang akan datang. Tujuan utama investasi adalah untuk meningkatkan nilai aset atau memperoleh pendapatan yang pasif, yang pada gilirannya dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Selain itu, investasi juga berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena hal ini dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong inovasi dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menjelaskan adanya hubungan antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurangnya investasi suatu wilayah akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita



di daerah tersebut. Hal ini terjadi karena terbatasnya kegiatan ekonomi, jadi jika investasi hanya terkonsentrasi di satu wilayah atau dengan kata lain ketimpangan distribusi investasi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan dalam pembangunan (Nurfifah, 2022).

Terdapat beberapa jenis investasi, diantaranya *autonomous investment* dan *induced invesment*, *public investment* dan *private investment*, *domestic invesment* dan *foreign invesment* (Fatihudin, 2019).

1. Investasi otonom, merupakan investasi yang besarnya tidak dipengaruhi oleh pendapatan dan perubahan faktor-faktor diluar pendapatan. Beberapa faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat investasi ini antara lain tingkat teknologi, kebijakan pemerintah, serta harapan para pengusaha.
2. Investasi terimbas, memiliki sifat yang berbeda, di mana tingkat investasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Secara fungsional, terdapat hubungan positif antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan. Jumlah total investasi yang dilakukan dalam suatu perekonomian merupakan gabungan dari investasi otonom dan investasi terimbas yang berfungsi sebagai hasil dari tingkat pendapatan.
3. Investasi publik, *public investment* merujuk pada jenis investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
4. Investasi swasta, *private investment* adalah investasi yang dilaksanakan



pihak swasta, di mana motivasi untuk meraih keuntungan di masa depan memiliki peranan penting dalam menentukan volume investasi tersebut.

5. Investasi asing, merujuk pada penanaman modal dari pihak luar. Negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, namun mungkin kurang dalam hal modal, sering kali berupaya untuk menarik investasi asing agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memiliki kebijakan yang sesuai.

2.1.5 Investasi PMDN

Investasi domestik merupakan penanaman modal yang dilaksanakan dalam negeri. PMDN memainkan peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan daya saing industri di dalam negeri. Secara umum, investasi PMDN memiliki potensi untuk memperburuk ketimpangan wilayah apabila terkonsentrasi di daerah-daerah yang sudah memiliki keunggulan, seperti infrastruktur yang memadai, tenaga kerja terampil, dan akses pasar yang luas.

Namun, PMDN juga dapat memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan wilayah jika arahnya difokuskan pada daerah-daerah yang kurang berkembang melalui kebijakan insentif dan pembangunan infrastruktur. Dengan adanya kenaikan investasi, diharapkan terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang akan mendorong pendapatan masyarakat secara keseluruhan dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan (Fahresi, 2025). Namun, jika kebijakan yang diterapkan tidak tepat sasaran serta belum memadai pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia di berbagai wilayah, maka peningkatan investasi berpotensi tidak akan memberikan manfaat yang optimal dan dapat menyebabkan ketimpangan antar wilayah melebar. Dalam hal ini, teori pembangunan regional menyoroti peran pemerintah dalam mendorong investasi di wilayah-wilayah



yang kurang berkembang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Selain itu, PMDN yang memprioritaskan sektor-sektor dengan keterkaitan antar wilayah, seperti industri pengolahan hasil pertanian, berpotensi menciptakan efek pengganda yang positif bagi perekonomian daerah sekitarnya.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Pengeluaran belanja pemerintah dengan ketimpangan pembangunan wilayah

Belanja pemerintah memainkan peran penting dalam mempengaruhi ketimpangan pembangunan wilayah. Dengan alokasi anggaran yang bijaksana, pemerintah dapat mengurangi disparitas antar daerah yang lebih maju dan daerah yang masih tertinggal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Harun & Ghozali (2012), menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan wilayah.

Pembangunan suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tidak hanya besarnya pengeluaran pemerintah, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dana tersebut. Pengelolaan dana yang efektif mencakup perencanaan yang matang serta transparansi dalam penggunaan anggaran. Apabila pemerintah dapat mengelolah pengeluaran dengan baik, dana yang dialokasikan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan demikian berpotensi untuk meningkatkan dampak positif dari pengeluaran pemerintah, mempercepat proses pembangunan, dan membantu mengurangi ketimpangan wilayah.



teori Rostow dan Musgrave, mengaitkan tahapan-tahapan pembangunan dengan pengeluaran pemerintah. Pada tahap awal pembangunan,

pemerintah cenderung memfokuskan investasi infrastruktur pada area-area tertentu yang dianggap strategis. Pendekatan ini berpotensi menyebabkan perbedaan dengan wilayah yang lainnya. Adapun manfaat dari pengeluaran pemerintah seringkali dipengaruhi oleh kebijakan dan prioritas pemerintah, yang pada gilirannya dapat berdampak pada tingkat ketimpangan wilayah, baik membesar maupun memperkecilnya.

Pengeluaran pemerintah dalam hal ini sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi disegala sektor baik di sektor pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat melalui perbaikan pada kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah secara merata. Sehingga, hal ini dapat diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat pula membantu mengurangi ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, dengan melanjutkan pembangunan secara bertahap akan sangat bermanfaat dalam menekan tingkat ketimpangan pada wilayah tertentu.

2.2.2 Hubungan antara jumlah penduduk dengan ketimpangan pembangunan wilayah

Teori neoklasik memberikan perhatian khusus pada pentingnya pasar bebas dalam pengalokasian sumber daya. Namun, dalam konteks ketimpangan wilayah, teori ini menyadari bahwa distribusi faktor-faktor seperti modal manusia, infrastruktur, dan teknologi tidaklah merata. Wilayah yang memiliki modal manusia yang lebih tinggi, infrastruktur yang lebih baik, dan akses yang lebih adap teknologi cenderung mampu menarik lebih banyak investasi serta ng pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, wilayah yang kurang berkembang



dalam aspek-aspek tersebut mungkin mengalami perlambatan dalam pertumbuhan, yang berpotensi menghasilkan ketimpangan wilayah.

Didaerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti daerah perkotaan, adanya konsentrasi kekayaan dan akses yang lebih baik terhadap layanan publik. Sementara itu, daerah dengan populasi sedikit cenderung menghadapi tantangan dalam hal perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah penduduk disertai dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah dalam melakukan pembangunan yang merata, sehingga dapat mengurangi ketimpangan antardaerah dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan perencanaan yang baik bisa membawa berbagai tantangan. Hal ini dapat memberikan tekanan pada infrastruktur, seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas kesehatan. Selain itu, persaingan dalam mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal juga dapat semakin meningkat, yang mungkin berpotensi menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperhatikan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang merata, serta memastikan akses yang adil terhadap layanan publik. Selain itu, penting untuk mendorong investasi di daerah-daerah dengan populasi yang lebih kecil, sehingga potensi ekonomi di kawasan tersebut dapat dimaksimalkan.

2.2.3 Hubungan antara investasi PMA dengan ketimpangan pembangunan wilayah



MA memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah jika ini pada daerah-daerah yang masih tertinggal. Secara umum,

Penanaman Modal Asing (PMA) dapat berkontribusi pada ketimpangan wilayah jika investasi tersebut lebih terkonsentrasi di daerah-daerah yang sudah maju dan memiliki infrastruktur yang memadai. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan kutub (growth pole theory), yang menyatakan bahwa investasi umumnya mengalir ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga daerah-daerah pinggiran seringkali tertinggal.

Berdasarkan teori Myrdal, terdapat kecenderungan bahwa investasi dapat berkontribusi pada peningkatan ketidakmerataan. Kondisi ini menjadikan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, infrastruktur yang baik, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi menarik bagi investor, sementara daerah yang lain tertinggal. Pola ini dapat memperkuat keunggulan wilayah yang sudah maju dan menimbulkan tantangan bagi wilayah tertinggal, sehingga memperlihatkan perlunya adanya intervensi kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan guna mengurangi kesenjangan yang timbul. Kondisi ini menjadikan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, infrastruktur yang baik, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi menarik bagi investor, sementara daerah yang lain tertinggal.

2.2.4 Hubungan antara investasi PMDN dengan ketimpangan pembangunan wilayah

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan dengan ketimpangan wilayah, yang dapat dipahami melalui berbagai teori ekonomi. Salah satu teori, yaitu teori pertumbuhan neoklasik, menyatakan bahwa



seharusnya dapat mendorong konvergensi antarwilayah. Di wilayah memiliki modal awal yang lebih rendah, PMDN diharapkan dapat kan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, sehingga menarik lebih

banyak investasi dan mempercepat pertumbuhan. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa faktor seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan stabilitas kelembagaan yang dapat menjadi tantangan dalam penyebaran investasi secara merata, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketimpangan antarwilayah.

Teori pertumbuhan berimbang (balanced growth theory) menekankan pentingnya investasi yang dilakukan secara merata di berbagai sektor dan wilayah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat krusial dalam mengarahkan PMDN melalui kebijakan insentif serta pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian lebih. Selain itu, transfer teknologi dan pengetahuan dari PMDN dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi dan daya saing di daerah-daerah tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho, Zulgani, Erni Achmad (2022) meneliti tentang Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah antar Provinsi Di Pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan regresi data panel. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan wilayah di Pulau Sumatera. Adapun hasil yang dapat disimpulkan adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah, pengangguran, investasi, dan tenaga kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. sementara itu, variabel Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah



Erni, et al (2021) meneliti terkait Analisis disparitas pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Jambi (segi ekonomi dan non ekonomi). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor yang berpengaruh terhadap disparitas pembangunan baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi. Adapun hasil penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian dari segi ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan yaitu, dana perimbangan dan investasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh. Dari segi non ekonomi hanya pembangunan manusia yang berpengaruh signifikan, sedangkan tenaga kerja dan kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan

Anggaharianto, et al (2021) meneliti Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara mulai Tahun 2015-2019 dengan menggunakan alat analisis yaitu Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Pearson Korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks williamson di Provinsi Maluku Utara di kategorikan ketimpangan taraf rendah.

Sedangkan berdasarkan analisis tipologi klassen Maju dan Tumbuh Cepat: Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah. Maju tapi Tertekan: Kabupaten Halmahera Timur. Cepat Berkembang tapi Tidak Maju: Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Taliabu. Maju tapi Tertekan: Kabupaten Halmahera Timur. Cepat Berkembang tapi Tidak Maju: Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Taliabu. Relatif Tertinggal: Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tidore. Dan berdasarkan korelasi $-0,379$

akan hubungan negatif antar pertumbuhan dan ketimpangan.



Penelitian yang dilakukan oleh Pinilih (2021), yang meneliti terkait disparitas pendapatan di Jawa Tengah dari tahun 2014-2019 dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan regresi berganda, memperoleh hasil bahwa investasi PMDN berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan PMA, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta angkatan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian oleh Fahma & Robertus (2022), meneliti tentang faktor-Faktor Yang mempengaruhi ketimpangan wilayah di Provinsi Dki Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur mulai dari tahun 2010-2020. Dengan menggunakan alat analisis Regresi Ordinary Least Square (OLS), menghasilkan bahwa variabel Investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional. Variabel aglomerasi, tingkat pengangguran berpengaruh negatif. Dan PDRB sektor primer dan panjang jalan tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu di Provinsi Kalimantan Timur, variabel aglomerasi, tingkat pengangguran, dan PDRB sektor primer berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan variabel investasi dan panjang jalan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ketimpangan regional.

Yasni & Heri (2020), meneliti terkait peran belanja modal dan belanja bantuan sosial pemerintah daerah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui peranan belanja modal dan bantuan sosial terhadap ketimpangan di Indonesia, dengan menggunakan alat



indeks theil, regresi data panel penelitian ini menghasilkan bahwa kedua secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan Provinsi Indonesia. Sedangkan secara parsial, variabel rasio belanja

modal berpengaruh signifikan, sedangkan variabel rasio belanja bantuan sosial berpengaruh tidak signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia.

Kurniati, et al (2021) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Investasi berpengaruh negatif signifikan. Dan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh yang bermakna dengan rendahnya ketimpangan pembangunan wilayah di Sulawesi Selatan.

Anin, et al meneliti tentang Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan variabel Indeks pembangunan manusia, infrastruktur jalan, investasi asing. Adapun hasil penelitian ini, Indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan. Sedangkan infrastruktur jalan dan investasi asing berpengaruh positif terhadap ketimpangan antar daerah. Namun secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah.

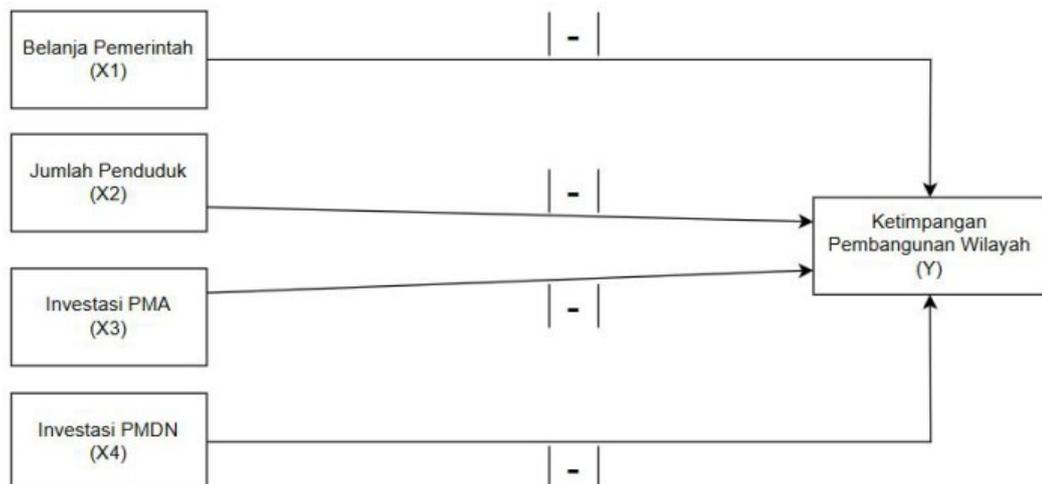
Rosmeli (2015), meneliti terkait dampak investasi dan tenaga kerja terhadap ketimpangan pembangunan kawasan timur Indonesia. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini yaitu, investasi PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan dan mempunyai arah yang negatif, sedangkan investasi PMA dan tenaga kerja mempunyai pengaruh signifikan

ketimpangan pembangunan di kawasan timur Indonesia dan mempunyai arah yang positif.



2.4 Kerangka Konseptual

Dengan mengacu pada landasan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Ketimpangan pembangunan wilayah (Y), Belanja Pemerintah (X1), Jumlah Penduduk (X2), dan Investasi (X3). Kerangka konseptual penelitian ini disusun secara visual untuk memperlihatkan gambaran mengenai bagaimana ketiga variabel independen tersebut diasumsikan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dengan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Maka, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

Hubungan antara belanja pemerintah, jumlah penduduk, investasi PMA, dan investasi PMDN dengan ketimpangan wilayah. Dalam hal ini, belanja diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, yang nantinya dapat menciptakan lapangan kerja serta mendorong daya beli masyarakat. Jumlah penduduk (X2),



investasi PMA (X3), dan Investasi PMDN (X4) juga memiliki peran penting sebagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah (Y). Semakin efektif jumlah penduduk dan investasi dikelola, semakin kecil kemungkinan ketimpangan tersebut. Sebaliknya, jika belanja pemerintah tidak dioptimalkan, atau jumlah penduduk meningkat tanpa diimbangi dengan investasi yang cukup, maka dapat meningkatkan ketimpangan pembangunan wilayah. Dengan demikian, ketiga komponen tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keseimbangan dan keadilan dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, optimalisasi belanja pemerintah, pengendalian pertumbuhan penduduk secara proporsional, serta peningkatan investasi yang strategis dianggap sebagai tiga komponen penting yang saling terkait dan memiliki peranan yang cukup berarti dalam upaya mewujudkan keseimbangan serta keadilan dalam pembangunan ekonomi di seluruh wilayah.

2.5 Hipotesis

Dengan merujuk pada landasan pemikiran yang bersifat teoritis serta berdasar pada studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
 2. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
 3. Diduga Investasi PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur
- Diduga Investasi PMDN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.





Optimized using
trial version
www.balesio.com